

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)**



**KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2022 dapat disusun.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2022, nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2022. Serta diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Kecamatan Halong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2022 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang.

Halong, Juli 2021

CAMAT HALONG



RUSMIN NURIADIN, S.Ag., S.Sos., MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19680321 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022	9
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA	19
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) adalah Dokumen Perencanaan Perubahan yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif Sub Kegiatan. Mendukung terwujudnya Good Governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Result Oriented Government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kecamatan Halong merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di Lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya, dari sisi dinamika Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian Target-Target RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, khususnya Target Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2022. Dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Balangan yang harus disesuaikan, serta untuk menyempurnakan

perencanaan agar bisa dilaksanakan dengan maksimal, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Kecamatan Halong Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Halong, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong dimulai dari usulan setiap Seksi atau PPTK dan juga dari Sekretariat, kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Halong untuk menentukan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan Review Hasil Evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Halong menetapkan Sasaran Kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian terhadap suatu sasaran. Pencapaian IKU Kecamatan Halong sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Halong sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	82	86,13	105,04%
Meningkatnya mandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM	0,6843	0,6643	97,08%

Nilai IKM di atas diperoleh dari Survey yang dilakukan Seksi Pelayanan Publik atas Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Halong, dengan jumlah responden sebanyak 25 orang untuk 1 (satu) semester. Sedangkan untuk Skor IDM diperoleh dari data isian terhadap quisioner yang diberikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada seluruh desa dalam Wilayah Kecamatan Halong untuk 1 (satu) tahun. Skor IDM di atas, masih menggunakan Skor IDM Tahun 2021, hal ini dikarenakan Skor IDM untuk Tahun 2023 baru akan terbit pada Bulan Agustus 2022. Untuk Nilai IKM formula perhitungan yang dipakai adalah sebagai berikut :

Formula Perhitungan		
$\frac{\text{Total Nilai IKM yang dicapai}}{\text{Target IKM}}$	X	100%

Adapun untuk Skor IDM, sampai saat ini Kecamatan Halong hanya diberikan hasil dari isian data terhadap quisioner yang

diberikan kepada seluruh desa pada Wilayah Kecamatan Halong, terkait formula perhitungan maka hal tersebut tidak diketahui.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Nilai IKM tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 108.418.000,- dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 53.575.000,- atau 49,41%. Sedangkan Target Kinerja adalah Nilai IKM sebesar 82 dengan realisasi sebesar 86,13 atau dengan capaian sebesar 105,04%. Sedangkan untuk mendukung Pencapaian Skor IDM, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 57.300.000,- dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 28.900.000,- atau 50,44%. Sedangkan Target Kinerja adalah Skor IDM sebesar 0,6843 dengan realisasi sebesar 0,6643 atau dengan capaian sebesar 97,08.

B. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Mewujudkan Sinergitas dan Singkronisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pengalokasian Anggaran secara Efektifitas dan Efisiensi sehingga menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur pada Kecamatan Halong dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Sasaran dan Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk.
3. Memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong.
4. Mempermudah Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2022.
5. Memberikan pedoman dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian pada Lingkungan Kecamatan Halong.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2022 ini adalah, sebagai Penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Halong Tahun 2022. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan Perubahan Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong diukur berdasarkan target yang dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Capaian Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2022, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Halong 2021-2026. Hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan Target Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Kecamatan Halong pada Tahun 2022 melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya Sasaran Strategis.

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II, maka untuk Capaian Kinerjanya adalah 73,01%, sedangkan Realisasi Anggarannya adalah sebesar 46,40%. Uraian selengkapnya terkait Capaian Kinerja per indikator sampai dengan Bulan Juni 2022, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0%, hal ini dikarenakan Dokumen Rencana Kerja Perubahan

Tahun 2022 maupun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 masih dalam Tahap Penyusunan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 3.556.000,- atau sebesar 88,77%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.006.000,-

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 25%, hal ini dikarenakan baru 1 (satu) dari 4 (empat) dokumen yang sudah selesai disusun. Yaitu baru Dokumen RKA-SKPD Tahun 2023 yang sudah selesai disusun, adapun untuk DPA-SKPD Tahun 2023 masih dalam proses penyusunan. Untuk Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD Perubahan Tahun 2022 masih dalam proses penyusunan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0,00%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.335.000,-

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan Laporan Pengukuran Kinerja yang disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dan Laporan Evaluasi Renja pada Aplikasi E-Monev yang disampaikan ke Bappedalitbang Kabupaten Balangan sudah selesai disusun dan ditandatangani camat. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 38.675.000,- atau sebesar 99,94%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 38.875.000,-.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan seluruh ASN pada Kecamatan Halong

terbayarkan Gaji dan Tunjangannya. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 1.150.703.439,- atau sebesar 44,81%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.568.214.843,-.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan seluruh Dokumen Penatausahaan Keuangan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 44.195.580,- atau sebesar 43,08%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 102.600.000,-.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50%, hal ini dikarenakan baru sebanyak 3 orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari target sebanyak 6 orang. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 21.300.000,- atau sebesar 52,10% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 40.880.000,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50%, hal ini dikarenakan sudah terealisasi 6 bulan dari target selama 12 bulan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 3.045.000,- atau sebesar 38,12% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.987.000,-

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 66,67%, hal ini dikarenakan sudah terealisasi sebanyak 58 kali Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas baik Dalam dan Luar Daerah dari target sebanyak 87 kali. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 65.847.056,- atau sebesar 53,32% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 123.489.000,-
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan seluruh Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dapat terbayar. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 8.552.828,- atau sebesar 25,01% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 34.200.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50%, hal ini dikarenakan sudah terealisasi 6 bulan dari target selama 12 bulan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 38.175.000,- atau sebesar 55,50% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 68.778.000,-
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan seluruh Kendaraan Dinas pada Kecamatan Halong adalah layak untuk difungsikan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 20.116.800,- atau sebesar 45,78% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.940.000,-

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan Kantor Kecamatan Halong, Rumah Dinas Camat Halong dan Gedung Serbaguna layak untuk difungsikan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 6.600.000,- atau sebesar 50% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.200.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan totalitasnya Seksi Pelayanan Publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan dibuktikan dengan Nilai IKM yang mencapai 105,04%. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 53.575.000,- atau sebesar 49,42%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 108.418.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50%, hal ini dikarenakan sudah terealisasi 6 bulan dari target

selama 12 bulan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 166.750.000,- atau sebesar 50%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 328.200.000,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan dalam setiap kegiatan Forkopimcam selalu Sinergi dan Solid, termasuk dalam Pelaksanaan Razia Masker, Vaksinasi, Pembagian BLT, dan lain-lain. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar 22,19%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.014.000,-.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 40%, hal ini dikarenakan baru 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan dan MTQ Tingkat Kabupaten, dari 5 (lima) Target Kegiatan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 75.275.000,- atau sebesar 41,83%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 179.940.000,-.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 82,50%, hal ini dikarenakan pada Tahap Pertama seluruh desa dalam Wilayah Kecamatan Halong (24 Desa) mengajukan Penyaluran DDs dan ADDBHPRD, sedangkan pada Tahap Kedua hanya 16 Desa. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 28.900.000,- atau sebesar 50,44%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 57.300.000,-.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan seluruh Tahapan Musrenbang baik pada Tingkat Desa maupun Kecamatan telah selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 7.536.600,- atau sebesar 99,63%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.564.800,-.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2022 sebagaimana penjelasan di atas, dapat juga dilihat pada tabel berikut ini :

**FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong	75.4 Nilai	20.944.835.350	69.21 Nilai	2.539.430.487	65.2 Nilai	3.048.504.843	69,21 Nilai	662.935.947	69,21 Nilai	1.400.766.703	69,21 Nilai	1.400.766.703	106,15	45,95	69,21 Nilai	1.400.766.703	91,79	6,69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	100%	111.377.450	100%	11.264.000	100%	45.216.000	33%	33.275.000	41,70%	42.231.000	41,70%	42.231.000	41,7	93,4	41,7 %	42.231.000	41,7	37,92
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disampaikan dengan Baik	100%	31.834.000	100%	8.298.000	100%	4.006.000	0%	0	0%	3.556.000	0%	3.556.000	0	88,77	0%	3.556.000	0	11,17
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase Dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan Baik	100%	16.768.450	100%	2.966.000	100%	2.335.000	0%	0	25%	0	25%	0	25	0	25%	0	25	0
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan Baik	100%	62.775.000	0%	0	100%	38.875.000	100%	33.275.000	100%	38.675.000	100%	38.675.000	100	99,49	100%	38.675.000	100	61,61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang Berlaku	72 Bulan	18.666.820.900	12 Bulan	2.246.203.890	12 Bulan	2.670.814.843	3 Bulan	545.353.558	6 Bulan	1.194.899.019	6 Bulan	1.194.899.019	50	44,74	18 Bulan	3.441.102.909	25	18,43
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100%	17.964.802.900	100%	2.151.740.217	100%	2.568.214.843	100%	530.833.558	100%	1.150.703.439	100%	1.150.703.439	100	44,81	100%	1.150.703.439	100	6,41
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	100%	702.018.000	100%	94.463.673	100%	102.600.000	100%	14.520.000	100%	44.195.580	100%	44.195.580	100	43,08	100%	44.195.580	100	6,3
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 Bulan	260.205.000	12 Bulan	14.320.000	12 Bulan	40.880.000	3 Bulan	21.300.000	6 Bulan	21.300.000	6 Bulan	21.300.000	50	52,1	18 Bulan	35.620.000	25	13,69
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 OP	260.205.000	3 OP	14.320.000	6 OP	40.880.000	3 OP	21.300.000	3 OP	21.300.000	3 OP	21.300.000	50	52,1	6 OP	35.620.000	17,65	13,69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	72 Bulan	810.665.000	12 Bulan	118.869.624	12 Bulan	131.476.000	3 Bulan	20.835.000	6 Bulan	68.892.056	6 Bulan	68.892.056	50	52,4	18 Bulan	187.761.680	25	23,16
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 Bulan	58.846.000	12 Bulan	8.154.500	12 Bulan	7.987.000	3 Bulan	1.995.000	6 Bulan	3.045.000	6 Bulan	3.045.000	50	38,12	18 Bulan	11.199.500	25	19,03
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	463 Kali	751.819.000	334 Kali	110.715.124	87 Kali	123.489.000	17 Kali	18.840.000	58 Kali	65.847.056	58 Kali	65.847.056	66,67	53,32	392 Kali	176.562.180	84,67	23,48

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	698.629.000	12 Bulan	79.714.573	12 Bulan	102.978.000	3 Bulan	25.454.889	6 Bulan	46.727.828	6 Bulan	46.727.828	50	45,38	18 Bulan	126.442.401	25	18,1
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terbayarnya Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	217.315.000	100%	15.326.573	100%	34.200.000	100%	4.079.889	100%	8.552.828	100%	8.552.828	100	25,01	100%	8.552.828	100	3,94
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Bulan	481.314.000	12 Bulan	64.388.000	12 Bulan	68.778.000	3 Bulan	21.375.000	6 Bulan	38.175.000	6 Bulan	38.175.000	50	55,5	18 Bulan	102.563.000	25	21,31
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	397.138.000	12 Bulan	69.058.400	12 Bulan	57.140.000	3 Bulan	16.717.500	6 Bulan	26.716.800	6 Bulan	26.716.800	50	46,76	18 Bulan	95.775.200	25	24,12
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	291.640.000	100%	42.433.400	100%	43.940.000	100%	14.517.500	100%	20.116.800	100%	20.116.800	100	45,78	100%	20.116.800	100	6,9
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Layak Fungsi	100%	105.498.000	100%	26.625.000	100%	13.200.000	100%	2.200.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000	100	50	100%	6.600.000	100	6,26
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	732.822.000	100%	87.850.000	100%	108.418.000	100%	21.555.000	100%	53.575.000	100%	53.575.000	100	49,42	100%	53.575.000	100	7,31
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	732.822.000	100%	87.850.000	100%	108.418.000	100%	21.555.000	100%	53.575.000	100%	53.575.000	100	49,42	100%	53.575.000	100	7,31
13.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	732.822.000	100%	87.850.000	100%	108.418.000	100%	21.555.000	100%	53.575.000	100%	53.575.000	100	49,42	100%	53.575.000	100	7,31
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa	100%	1.698.200.000	0%	0	100%	328.200.000	50%	8.290.000	75%	166.750.000	75%	166.750.000	75	50,81	75%	166.750.000	75	9,82
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	1.698.200.000	0%	0	100%	328.200.000	50%	8.290.000	75%	166.750.000	75%	166.750.000	75	50,81	75%	166.750.000	75	9,82
14.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	60 Bulan	1.698.200.000	0 Bulan	0	12 Bulan	328.200.000	3 Bulan	8.290.000	6 Bulan	166.750.000	6 Bulan	166.750.000	50	50,81	6 Bulan	166.750.000	10	9,82
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	100%	53.115.000	0%	0	100%	9.014.000	100%	0	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100	22,19	100%	2.000.000	100	3,77
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Waktu Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Bulan	53.115.000	0 Bulan	0	12 Bulan	9.014.000	3 Bulan	0	6 Bulan	2.000.000	6 Bulan	2.000.000	50	22,19	6 Bulan	2.000.000	10	3,77
15.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	100%	53.115.000	0%	0	100%	9.014.000	100%	0	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100	22,19	100%	2.000.000	100	3,77

5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	993.890.000	100%	92.530.000	100%	179.940.000	20%	21.000.000	40%	75.275.000	40%	75.275.000	40	41,83	40%	75.275.000	40	7,57
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100%	993.890.000	100%	92.530.000	100%	179.940.000	20%	21.000.000	40%	75.275.000	40%	75.275.000	40	41,83	40%	75.275.000	40	7,57
16.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	32 Keg	993.890.000	4 Keg	92.530.000	5 Keg	179.940.000	1 Keg	21.000.000	2 Keg	75.275.000	2 Keg	75.275.000	40	41,83	6 Keg	167.805.000	18,75	16,88
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	444.295.000	100%	55.960.000	100%	64.864.800	100%	17.876.600	100%	36.436.600	100%	36.436.600	100	56,17	100%	36.436.600	100	8,2
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	444.295.000	100%	55.960.000	100%	64.864.800	100%	17.876.600	100%	36.436.600	100%	36.436.600	100	56,17	100%	36.436.600	100	8,2
17.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa dengan Administarsi Pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa Lengkap	100%	393.885.000	100%	50.040.000	100%	57.300.000	100%	10.340.000	82,50%	28.900.000	82,50%	28.900.000	82,5	50,44	82,50%	28.900.000	82,5	7,34
18.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang Menyampaikan Usulan Musyawarah Pembangunan Desa Tepat Waktu	100%	50.410.000	100%	5.920.000	100%	7.564.800	100%	7.536.600	100%	7.536.600	100%	7.536.600	100	99,63	100%	7.536.600	100	14,95
Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sub Kegiatan														73,01	46,4					
Jumlah Anggaran dari seluruh Program								3.738.941.643	731.657.547	1.734.803.303	1.734.803.303									

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab II di atas, bahwa dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Halong melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ada tambahan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penambahan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan Semangat Kerja Aparatur Kecamatan Halong, sehingga target-target yang telah ditetapkan baik itu Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja dapat tercapai. Khusus untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor Indeks Desa Membangun (IDM), maka perlu disampaikan bahwa Kecamatan Halong tidak memiliki peran signifikan terhadap perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) tersebut (dapat dilihat pada Buku SOP IDM [BUKU SOP IDM Tahun 2022.pdf](#)).

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN HALONG TAHUN 2022**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Alasan Perubahan
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong	65.2	3.048.504.843	65.2	3.573.295.803	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	100%	45.216.000	100%	45.216.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disampaikan dengan Baik	100%	4.006.000	100%	4.006.000	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan Baik	100%	2.335.000	100%	2.335.000	-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan Baik	100%	38.875.000	100%	38.875.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang Berlaku	12 Bulan	2.670.814.843	12 Bulan	2.808.291.803	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100%	2.568.214.843	100%	2.703.651.803	kenaikan TPP dan IWP TPP terhutang
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	100%	102.600.000	100%	104.640.000	tambahan iuran JKK dan JKM THL 17 orang

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	40.880.000	12 Bulan	40.880.000	
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 OP	40.880.000	6 OP	40.880.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	131.476.000	12 Bulan	190.042.000	
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7.987.000	12 Bulan	7.987.000	-
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	87 Kali	123.489.000	87 Kali	182.055.000	meningkatnya frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	-	12 Bulan	296.000.000	
		9.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	-	-	1 Unit	230.000.000	meningkatkan mobilitas dan rusak beratnya mobil hilux operasional ke desa
		10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	-	-	7 Buah	66.000.000	kekurangan sarana pendukung kerja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	102.978.000	12 Bulan	111.842.000	
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terbayarnya Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	34.200.000	100%	24.200.000	kelebihan pagu belanja pembayaran tagihan listrik
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	68.778.000	12 Bulan	87.642.000	tambahan THL 3 orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	57.140.000	12 Bulan	81.024.000	
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	43.940.000	100%	63.424.000	meningkatkan mobilitas

5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	179.940.000	100%	158.186.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100%	179.940.000	100%	158.186.000	
16.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	18.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Keg	179.940.000	5 Keg	158.186.000	kelebihan pagu belanja makanan dan minuman rapat
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	64.864.800	100%	95.664.800	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	64.864.800	100%	95.664.800	
17.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa dengan Administarsi Pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa Lengkap	100%	57.300.000	100%	88.100.000	tambahan THL 7 orang
18.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang Menyampaikan Usulan Musyawarah Pembangunan Desa Tepat Waktu	100%	7.564.800	100%	7.564.800	-
Jumlah Anggaran dari seluruh Program						3.738.941.643		4.299.178.603	

Terkait adanya Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan (sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas), maka untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.568.214.843,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 135.436.960,- akibat adanya Rencana Kenaikan Tunjangan Penghasilan Penghasilan Pegawai (TPP) dan adanya Hutang Iuran Jaminan Kesehatan TPP ASN.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 102.600.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.040.000,- untuk Pembayaran Iuran JKK dan JKM Tenaga Harian Lepas (THL) Baru sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 123.489.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 58.566.000,- dengan tujuan untuk Peningkatan Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan ini baru dimasukkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan Mobilitas Aparatur khususnya Camat Halong dan juga disebabkan dengan Rusak Beratnya Mobil Operasional Lapangan Toyota Hilux.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini baru dimasukkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), hal ini disebabkan masih kurangnya Sarana Pendukung Kerja, sehingga nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan Semangat Kerja.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 34.200.000,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- akibat adanya kelebihan Anggaran Belanja Tagihan Listrik. Anggaran dimaksud selanjutnya digeser ke Sub Kegiatan lainnya.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 68.778.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.864.000,- akibat adanya Penambahan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 3 (tiga) orang.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.940.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.484.000,- untuk menambah Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas serta Belanja Servis. Dengan harapan dapat lebih meningkatkan Mobilitas Aparatur.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.200.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.400.000,- akibat adanya Penambahan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 1 (satu) orang.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 108.418.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- akibat adanya Penambahan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 6 (enam) orang.
 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 179.940.000,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.754.000,- akibat adanya Kelebihan Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Anggaran dimaksud selanjutnya digeser ke Sub Kegiatan lainnya.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendetayagunaan Aset Desa
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57.300.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.800.000,- akibat adanya Penambahan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 7 (tujuh) orang.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2022, yang selanjutnya akan dibarengi dengan perubahan produk turunannya yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Maka diharapkan dampaknya akan dirasakan, yaitu dengan semakin meningkatnya Semangat Kerja seluruh Aparatur Kecamatan Halong. Sehingga target-target yang telah ditetapkan, baik itu target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun pada Indikator Kinerja.

Halong, Juli 2021



CAMAT HALONG

RUSMIN NURIADIN, S.Ag., S.Sos., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19680321 199101 1 001